

RELASI GENDER DALAM INSTITUSI KELUARGA (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)

Nur Aisyah
Pemerhati HAM Dan Gender
Nuraisyah@yahoo.com

Abstract: *This study departs from the reality of gender relations within the family institution which has to be dikhotomis, causing the pole inequality relations between men and women. Therefore, in this study wanted to dismantle the detail view of some theories, both social and feminist about gender relations in the family. Each of these theories (structural functional, conflict and feminist) has their own viewpoint about the pattern of gender relations in the family. However, simultaneously acknowledging that the social construction of culture remained significant influence on the division of roles are played by men (husbands) and women (wife) in the family institution. This means that the social construction of culture was instrumental in the creation of relations contribute between men and women equally or otherwise occurred inequality.*

Keywords: *Family, Gender Relations, Social Theory, Feminist*

Abstraks: Penelitian ini berangkat dari realitas hubungan gender dalam institusi keluarga yang harus dikhotomis, menyebabkan hubungan ketimpangan tiang antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ingin membongkar tampilan detail dari beberapa teori, baik sosial dan feminis tentang relasi gender dalam keluarga. Masing-masing teori ini (struktural fungsional, konflik dan feminis) memiliki pandangan mereka sendiri tentang pola hubungan gender dalam keluarga. Namun, secara bersamaan mengakui bahwa konstruksi sosial budaya tetap berpengaruh signifikan terhadap pembagian peran yang dimainkan oleh laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam institusi keluarga. Ini berarti bahwa konstruksi sosial budaya sangat berperan dalam penciptaan hubungan berkontribusi antara laki-laki dan perempuan sama-sama atau terjadi ketimpangan.

Kata Kunci: *Keluarga, Relasi gender, Teori Sosial, Feminis*

Pendahuluan

Keluarga merupakan institusi terkecil dari masyarakat dan negara, yang memiliki struktur sosial serta sistemnya sendiri. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah disebut keluarga batih. Menurut Horton dan Hunt (Narwarko, 2007 : 227), istilah keluarga digunakan untuk menunjuk beberapa pengertian, antara lain: (1) suatu kelompok yang mempunyai nenek moyang yang sama; (2) suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan; (3) pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak; (4) pasangan nikah dengan anak; (5) satu orang, janda atau duda (*singgle parent*) dengan satu atau beberapa anak. Konsep dalam keluarga konvensional, suami sebagai pemberi nafkah dan pelindung keluarganya. Keluarga dalam konsep ini jelas menempatkan laki-laki dalam posisi yang strategis dan menyebabkan perempuan menjadi ketergantungan terhadap laki-laki.

Dalam kehidupan di abad ke-21 yang ditandai oleh individualisasi dan mobilisasi, keluargalah yang tetap

mempunyai arti pokok bagi manusia. Keluarga tetap tergolong institusi sosial terpenting. Namun anggapan mengenai wujud keluarga, dan juga struktur keluarga itu sendiri telah mengalami perubahan besar berkenaan dengan pergantian sosial. Dahulu dalam keluarga tradisional golongan menengah, pasangan suami-istri yang hidup dalam perkawinan seumur hidup mengasuh beberapa anak dengan pembagian peran yang tegas: Sang ayah bekerja untuk mencari nafkah, sang ibu mengurus rumah tangga. Namun pola keluarga tersebut tidak lagi merupakan cara hidup yang diikuti kebanyakan orang. Bentuk kehidupan bersama kian beragam. Perkembangan ini untuk sebagian besar terkait dengan persamaan hak dan dengan peran perempuan yang telah berubah: Kini sekitar 65 persen ibu-ibu bekerja, sedangkan keluarga menjadi lebih kecil, bahkan dengan pola relasi suami isteri yang juga mengalami pergeseran.

Kajian ini ingin membahas lebih lanjut tentang pola relasi dalam institusi keluarga menurut pandangan teori sosial maupun feminis, dengan argumen bahwa masing-masing teori mempunyai landasan filosofis tersendiri dan tentunya suatu teori akan muncul dari realitas kehidupan sosial dari para pencetusnya.

Pembahasan

A. Gender: Acuan Teoritis

1. Konsep Gender Dan Seks

Konsep gender tidak akan bisa dipahami secara komprehensif tanpa melihat konsep seks. Kekeliruan pemahaman dan pencampuran kedua konsep tersebut sebagai sesuatu yang tunggal, akan melanggengkan ketimpangan dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Selain itu, pemahaman dan pembedaan terhadap kedua konsep tersebut sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial secara lebih luas. Hal ini terjadi karena ada kaitan yang erat ketidakadilan gender dengan struktur ketidakadilan masyarakat.

Dalam kamus bahasa Inggris, *sex* dan *gender*, sama-sama diartikan sebagai “jenis kelamin” (Echols, 1993 : 263). Akan tetapi antara keduanya mempunyai pengertian yang berbeda. Seks adalah jenis kelamin biologis yang merupakan pensifatan dua jenis kelamin manusia yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Seperangkat alat reproduksi yang secara biologis melekat pada masing-masing jenis kelamin tertentu, untuk selamanya tidak dapat dipertukarkan karena bersifat *given*, merupakan ketentuan Tuhan atau kodrat. Sedangkan gender adalah jenis

kelamin sosial, yaitu suatu sifat yang melekat/dilekatkan pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Ciri dari sifat itu sendiri dapat dipertukarkan, dapat berubah dari waktu ke waktu, serta berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Terbentuknya perbedaan gender melalui proses yang sangat panjang, dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksi secara sosio- kultural bahkan melalui ajaran keagamaan maupun negara (Fakih, 1999 : 5).

Sedangkan Heddy Shri Ahimsa Putra (Putra, 2002 : 4), membagi istilah gender dalam beberapa pengertian antara lain: **Pertama**, gender sebagai suatu istilah asing dengan makna tertentu yang tidak banyak diketahui orang, sehingga wajar jika istilah gender menimbulkan kecurigaan tertentu pada sebagian orang yang mendengarnya. Seringkali orang memandang perbedaan gender disamakan dengan perbedaan jenis kelamin (*sex*), sehingga menimbulkan pengertian yang salah. **Kedua**, gender sebagai suatu fenomena sosial budaya. Perbedaan jenis kelamin adalah alami dan kodrati dengan ciri-ciri yang jelas dan tidak dapat dipertukarkan. Sebagai fenomena sosial gender bersifat relatif dan kontekstual. Gender yang dikenal masyarakat Jawa akan berbeda dengan masyarakat Bali atau

Minangkabau. Hal ini terjadi karena adanya kontruksi sosial budaya yang membedakan peran berdasarkan jenis kelamin.

Sebagai konsep sosial-budaya, perbincangan gender tentu lebih dinamis karena mempertimbangkan variable psiko-sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, dengan bahasa yang berbeda Nassarudin Umar menegaskan bahwa, konsep gender adalah konsep dimana pembagian peran antara laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada pemahaman yang bersifat normatif dan kategori biologis melainkan pada kualitas dan *skill* berdasarkan konvensi-konvensi sosial (Umar, 1999 : xx).

Lebih tegas lagi, dalam teori *nature* dan *nurture* memberikan pemahaman konsep gender dengan dua landasan yang berbeda. Teori *nature* menganggap bahwa, perbedaan laki-laki dan perempuan bersifat kodrati, *given from Allah*. Anatomi biologis yang berbeda dari laki-laki dan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial dua jenis kelamin tersebut. Laki-laki berperan utama dalam masyarakat karena dianggap lebih potensial, lebih kuat dan lebih produktif. Sedangkan perempuan karena organ reproduksinya (hamil, menyusui dan menstruasi), dinilai memiliki ruang gerak terbatas. Perbedaan itulah yang

akhirnya melahirkan pemisahan dua fungsi dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berperan disektor publik dan perempuan disektor domestik. Sedangkan teori *nurture* beranggapan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan hasil kontruksi masyarakat. Sehingga peran sosial (peran domestik mutlak milik perempuan dan publik mutlak milik laki-laki), yang selama ini dianggap baku bahkan dipahami sebagai doktrin agama, sesungguhnya bukan kehendak Tuhan dan tidak juga sebagai produk determinis biologis, melainkan sebagai hasil kontruksi sosial (*social construction*) (Megawangi, 1999 : 93-102).

Berangkat dari pemikiran di atas, menurut hemat penulis dapat disimpulkan bahwa, konsep gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya atau non-biologis. Dengan bahasa yang lengkap, gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan, sebagai hasil konstruksi sosio-kultural yang tumbuh dan disepakati oleh masyarakat dengan proses yang sangat panjang, bisa berubah dari waktu ke waktu, tempat ke tempat, bahkan

dari kelas-ke kelas sesuai perkembangan zaman. Sedangkan seks adalah jenis kelamin biologis yang melekat pada masing-masing jenis kelamin tertentu dan tidak dapat dipertukarkan karena merupakan kodrat.

Gender bukan kodrat atau ketentuan Allah SWT, karena terkait dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki atau perempuan berperan dan bertindak sesuai tata nilai ketentuan sosial- budaya masyarakatnya. Sedangkan seks adalah kodrat atau ketentuan Allah SWT dan jelas-jelas bisa dibedakan antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak bisa ditukar. Akan tetapi, dengan proses sosialisasi yang panjang dan penguatan secara kultural bahkan oleh agama dan negara atas ideologi gender menjadikan seolah-olah gender sama dengan jenis kelamin biologis (seks). Oleh karena itu, bisa saja seseorang yang secara biologis dikategorikan sebagai perempuan, tetapi dari sudut gender berperan sebagai laki-laki atau sebaliknya. Misalnya, seorang suami yang karena satu hal memilih bekerja di rumah mengasuh anak dan mengurus kehidupan rumah tangga (domestik), maka dari segi gender dia memilih berperan sebagai perempuan, meskipun secara seksual adalah laki-laki. Sebaliknya seorang istri karena ketrampilannya dan kesepakatan bersama

memilih bekerja mencari nafkah atau mengembangkan kariernya di kantor, maka dia berperan gender laki-laki meskipun secara seksual adalah perempuan.

2. Peran Gender

Sebagaimana telah dibahas dalam point sebelumnya, gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan, sebagai hasil konstruksi sosio-kultural yang tumbuh dan disepakati oleh masyarakat melalui proses yang panjang serta bisa berubah dari waktu ke waktu, tempat ke tempat, bahkan dari kelas-ke kelas sesuai perkembangan zaman. Peran gender sendiri diartikan sebagai ide-ide kultural yang menentukan harapan-harapan pada laki-laki dan perempuan dalam berinteraksi antara satu dengan lainnya dalam masyarakat (Kessler, 1977 : 73). Sedangkan perubahan sosial adalah munculnya varian-varian baru sebagai hasil modifikasi selama berlangsungnya proses sosial dari bentuk pola perilaku, struktur sosial dan interaksi sosial termasuk di dalamnya perubahan nilai, norma dan kultural (Sztompka, 2005 : 4-5).

Berangkat dari pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa, peran gender

akan selalu mengalami perubahan mengikuti perubahan sosial yang dinamis. Misalnya pada masyarakat tradisional. Pembagian kerja pada masyarakat ini dilakukan berdasarkan jenis kelamin. Pekerjaan laki-laki sesuai kapasitasnya sebagai laki-laki, dimana secara umum dikonsepsikan sebagai orang yang memiliki otot lebih kuat, berani dan mampu bekerjasama. Sementara pekerjaan perempuan juga di sesuaikan dengan konsepsinya sebagai makhluk yang lemah, dengan tingkat risiko lebih rendah, lamban dan lain-lain.

Hal tersebut senada dengan hasil penelitian George Peter Murdock. Pada masyarakat tradisional laki-laki konsisten dengan pekerjaan yang bersifat maskulin, seperti: tukang kayu, membuat kapal, tukang batu, mengerjakan logam menambang dan menyamak kulit. Sedangkan perempuan lebih konsisten pada pekerjaan feminim, yaitu: mencari kayu bakar, meramu dan menyediakan minuman dan makanan, mencuci, mengambil air dan memasak (Sanderson, 2003 : 396). Akan tetapi sebagai akibat dari pertumbuhan dan mobilisasi penduduk, urbanisasi dan revolusi industri yang menimbulkan berbagai perubahan sosial, maka peran dan posisi laki-laki dan perempuan juga ikut berubah. Dengan kata lain terjadi pergeseran peran antara

laki-laki dan perempuan. Perempuan semakin menyadari bahwa di luar sektor domestik telah terjadi perkembangan yang sangat pesat. Pada saat yang sama mereka juga menyadari norma-norma di sektor domestik telah membatasi ruang gerak perempuan untuk berkiprah di sektor publik. Perkembangan ekonomi global telah memberikan daya dukung terhadap peningkatan taraf hidup dan martabat kaum perempuan, yang akhirnya secara kualitatif dan kuantitatif perempuan mengalami peningkatan. Inilah yang oleh Simmel dikatakan sebagai proses sosial disosiatif (Horton, 1991 : 380). Proses sosial disosiatif adalah kontradiksi-dialektis berbagai kekuatan (internal dan eksternal) yang menjadi penggerak perubahan sosial. Proses sosial yang penuh dengan kontradiksi-dialektis *nota bene* mengandung konflik dan konflik tersebut inheren dengan kehidupan itu sendiri.

Perubahan sosial ternyata bergelindan erat dengan perubahan peran gender, yaitu adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi adanya perubahan tersebut. Perubahan bisa terjadi secara revolutif maupun secara evolutif, hal ini terjadi karena adanya kontrol sosial yang bisa mengendalikan perubahan tersebut. Menurut para pakar sosiologi, perubahan sosial meliputi beberapa

dimensi antara lain: dimensi struktural, kultural dan interaksional. Dimensi struktural menampakan diri pada perubahan status dan peranan. Perubahan status dapat diidentifikasi dari ada tidaknya perubahan peran, kekuasaan, otoritas, fungsi, integrasi, hubungan antar status dan arah komunikasi. Sementara perubahan kultural dapat dilihat dari ada tidaknya perubahan dalam budaya material (teknologi) maupun non material (ide, nilai, norma, peraturan, kaidah sosial) yang menjadi *collective consciousness* antar warga. Perubahan interaksional lebih menunjuk pada konsekuensi logis dari adanya perubahan dari kedua dimensi lainnya. Misalnya interaksi sosial sebagai konsekuensi dari perubahan dalam dimensi struktural, bisa saja terjadi karena adanya perubahan nilai atau kaidah sosial.

Dalam konteks peran gender, perubahan pada struktur dapat dilihat melalui peran yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan pembagian kerja dan status. Status dapat dilihat dari distribusi kekayaan, pengambilan keputusan, penghasilan, kekuasaan dan prestise. Misalnya, peran dan posisi perempuan dikaitkan dengan lingkup domestik dan berurusan dengan lingkup kerumahtanggaan, sementara laki-laki urusan publik atau luar rumah

(pembagian kerja dalam rumahtangga). Oleh karena itu, perempuan selalu ditempatkan dalam peran dan posisi minoritas karena dianggap mempunyai status lebih rendah daripada laki-laki. Bagi perempuan, struktur tersebut masih sulit untuk mengimbangi laki-laki, karena bagi perempuan yang ingin berkiprah di ranah publik masih harus bertanggungjawab di ranah domestik (beban ganda). Perempuan dalam hal ini tidak berdaya untuk menghindari dari ranah tersebut karena sudah menjadi persepsi budaya secara umum. Kontrol budaya yang bersifat patriarkhi menjadi penghambat adanya perubahan peran gender (Lindsey, 1990 : 89).

Dalam konteks masyarakat modern, dengan berbagai perubahan dimana keluarga dan unit rumahtangga telah berubah dari sistem keluarga besar (*extended famili*) menjadi keluarga inti (*nuclear family*) yang menjadi salah satu ciri masyarakat modern, sehingga peran dan fungsi suami-isteri sangat bervariasi. Menurut F. Ivan Nye, peran suami-istri dalam keluarga *nuclear* dapat dikategorikan, antara lain: segalanya pada suami; suami melebihi peran isteri; suami-isteri memiliki peran yang sama, peran isteri melebihi suami dan segalanya pada isteri (Narwoko, 2007 : 301)

Menurut hemat penulis, hal tersebut di atas terjadi karena dalam masyarakat modern peran seseorang tidak hanya mengacu pada norma-norma kebiasaan yang mengacu pada jenis kelamin akan tetapi ditentukan oleh daya saing dan *skill*. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpeluang untuk memperoleh kesempatan dalam persaingan, sehingga peran antara ke duanya bisa ditukar dan bertukar sesuai dengan tuntutan dunia modern.

3. Dikotomi Peran Gender: Melahirkan Ketidakadilan

Dikotomi peran domestik-publik antara laki-laki dan perempuan, menjadi sebab utama terkungkungnya perempuan di ranah domestik dan laki-laki bebas bergerak di ranah publik. Hal tersebut *linier* dengan pembakuan peran laki-laki sebagai kepala keluarga dan berkewajiban mencari nafkah (publik, produksi), sedangkan perempuan (istri) berperan sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban mengatur urusan kerumahtanggaan (domestik, reproduksi). Kerja domestik yang secara ekonomis tidak bernilai, layak diberikan pada perempuan dan pekerjaan publik, yang tentunya bernilai ekonomis selayaknya diberikan pada laki-laki. Posisi ini dianggap lebih tinggi sehingga laki-

laki secara ekonomi berkuasa (dominan) termasuk juga atas perempuan. Akibat dikotomi publik-domestik, maskulin-feminin dan dominan-subordinasi, akhirnya melahirkan ketidakadilan terutama bagi kaum perempuan termasuk dalam aspek kehidupan ekonomi.

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, implikasi yang lebih luas adalah terjadinya ketimpangan pola relasi antara suami-isteri dalam bentuk, antara lain: (1) Istri harus patuh dan menghormati suami; (2) segala kegiatan istri di luar rumah harus seijin suami dan; (3) istri harus bertanggung jawab terhadap semua kegiatan domestik (memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengasuh anak dan lain-lain). Sehingga secara sosial istri adalah warga kelas dua, *inferior* yang berada di bawah dominasi laki-laki dan tentunya secara ekonomi menjadi tergantung pada laki-laki (suami).

Sebenarnya dikotomi peran antara laki-laki dan perempuan tidak akan menjadi masalah, apabila tidak melahirkan ketimpangan relasi gender yang pada akhirnya melahirkan ketidakadilan gender. Akan tetapi yang terjadi dalam realitas adalah sebaliknya, dimana peran gender dalam realitas selalu melahirkan ketidakadilan. Hal tersebut terjadi karena kontruksi masyarakat yang *bias* laki-laki, dimana laki-laki

mempunyai peran dan status yang lebih tinggi dibanding perempuan, sehingga superioritas dan dominasi ada di tangan suami. Kinnon mengemukakan bahwa relasi kuasa dimana laki-laki mempunyai peran yang lebih dominan, status yang lebih tinggi dan kekuasaan lebih besar dari perempuan maka relasi yang ada diantara keduanya akan menjadi timpang (Nye, 1976 : 16).

Proses pembentukan peran gender, pada umumnya diproduksi ketika seorang anak dilahirkan. Dalam masyarakat patriarkhi (Jocobsen, 1994 : 546), begitu lahir melalui alat kelaminnya seorang anak dapat dikenali apakah dia laki-laki atau perempuan. Jika mempunyai *penis* maka dikonsepsikan sebagai anak laki-laki dan jika mempunyai *vagina* maka dikonsepsikan sebagai anak perempuan. Pada saat yang bersamaan, peran gender dari lingkungan masyarakatnya juga mulai diperoleh. Misalnya, anak yang secara biologis lahir sebagai laki-laki, maka oleh orang tua akan diberikan sinyal yang berbau maskulin, mulai dari mainan yang dipilih (pedang, pistol, pesawat, mobil-mobilan dan lain-lain), warna dan gambar baju yang dipakai sampai tokoh-tokoh permainan yang disosialisasikan juga bernuansa maskulin, heroik dan kuat. Sebaliknya bagi bayi perempuan, akan disuguhi dengan berbagai hal yang

bernuansa feminin. Misalnya: boneka, mainan masak-masakan dan berbagai atribut yang penuh dengan kelembutan dan non-heroik.

Tujuan dari semua itu adalah, agar laki-laki memiliki karakteristik “kejantanan” atau *masculinity*, sedangkan perempuan memiliki karakteristik “kewanitaan” atau *femininity*. Dengan karakter tersebut, akhirnya perempuan dipresepsikan sebagai manusia yang lemah, gemulai, lembut dan lain-lain. Sebaliknya laki-laki dipersepsikan sebagai manusia perkasa, tegar, kuat, agresif dan lain-lain. Laki-laki dianggap lebih cerdas dan lebih kuat dalam banyak hal daripada perempuan. Anggapan-anggapan budaya tersebut, dengan sendirinya memberikan peran lebih luas kepada laki-laki dan pada saatnya laki-laki memperoleh sttus lebih tinggi dari perempun dalam struktur sosial sehingga relasi gender antara keduanya menjadi tidak setara atau timpang dan menimbulkan persoalan *bias* gender. *Bias* gender adalah padangan yang membedakan peran, kedudukan dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat bahkan negara. Persoalan *bias* gender inilah yang pada akhirnya melahirkan ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi, subordinasi ,

stereotipe, beban ganda dan tindak kekerasan terhadap perempuan.

a. Marginalisasi

Marginalisasi menurut Grijns adalah proses perubahan hubungan kekuasaan antar manusia melalui suatu cara, sehingga salah satu kelompok makin terputus aksesnya ke sumber-sumber daya seperti: tanah, air, modal, pekerjaan, pendidikan, politik dan lain-lain (Demartoto, 2007 : 21). Sedangkan Scoot mendefinisikan bahwa marginalisasi adalah proses peminggiran kelompok masyarakat oleh kelompok masyarakat lainnya yang mengakibatkan salah satu kelompok tersisihkan (Demartoto, 2007 : 21). Sebagai contoh, dengan hanya mengakui laki-laki sebagai "kepala rumah tangga" tidak memberi ruang bagi kaum perempuan untuk mendapatkan akses kredit, mendapatkan tunjangan keluarga, dan lain-lain. Bentuk-bentuk marginalisasi perempuan dalam 4 (empat) dimensi: **Pertama**, marginalisasi sebagai proses penyingkiran perempuan dari pekerjaan-pekerjaan produktif yang menghasilkan upah. **Kedua**, marginalisasi sebagai proses

pemusatan perempuan pada pinggiran pasar kerja atau sektor informal. **Ketiga**, marginalisasi sebagai proses feminisasi bagi sektor-sektor produktif tertentu. **Keempat**, marginalisasi sebagai suatu proses menuju ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

b. Subordinasi

Dalam keluarga, perempuan (isteri) masih sering mengalami tekanan psikis dari suami dan keluarga laki-laki lainnya. *Swargo nunut neroko katut* yang dipandang sebagai label bagi kaum perempuan menjadi hambatan tersendiri bagi posisi dan aktivitas perempuan (isteri). Akses, perencanaan dan pengambilan keputusan tidaklah penting bagi kaum perempuan. Dalam kondisi seperti ini perempuan tidak dipandang sebagai diri sendiri akan tetapi sebagai subordinat atau bagian dari laki-laki.

c. Stereotipe

Perbedaan dan pembagian gender juga membentuk pelabelan atau *stereotype* terhadap kaum perempuan yang berakibat pada penindasan terhadap mereka. Stereotipe adalah pelabelan terhadap kelompok tertentu

yang berkonotasi negatif sehingga sering menimbulkan ketidakadilan. Pelabelan yang dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin tertentu, misalnya perempuan, akan menimbulkan kesan negatif yang disandangnya. Misalnya, perempuan adalah manusia yang lemah fisik dan intelektualnya sehingga tidak layak menjadi pemimpin. Laki-laki adalah "pencari nafkah" mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh kaum perempuan dianggap sebagai "sambilan atau tambahan". Adanya stereotipe yang oleh masyarakat dianggap sebagai ketentuan kodrati atau ketentuan Tuhan, akhirnya mengakibatkan terkondisikannya posisi perempuan dalam posisi lebih rendah ketimbang laki-laki.

d. Beban Kerja Yang Tidak Porposional

Budaya patriarkhi beranggapan bahwa perempuan tidak mempunyai hak untuk menjadi pemimpin rumahtangga sehingga berhak diatur oleh suami. Sehingga pekerjaan domestik yang dibebankan oleh perempuan seolah-olah identik dengan dirinya. Pekerjaan yang cukup beragam dengan waktu yang tidak terbatas dan dengan beban yang cukup berat,

misalnya: memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengasuh anak, membimbing anak-anak belajar dan segala pekerjaan domestik lainnya, dilakukan bersama-sama dengan fungsi reproduksi seperti haid, hamil, menyusui. Sementara laki-laki dengan peran publiknya dianggap tidak pantas bertanggungjawab terhadap pekerjaan domestik. Apalagi bagi perempuan yang bekerja di sektor publik, beban itu akan semakin berat, karena mereka harus menanggung beban pekerjaan publik sekaligus bertanggungjawab atas pekerjaan domestik. Bisa dibilang bahwa, perempuan pekerja (karier) tidak hanya mempunyai beban ganda, *double burden* akan tetapi *triple burden* bahkan *multy burden*.

Hal tersebut senada dengan pemikiran Fernando Bartolome (Pambudy, 2004 : 356). Dalam suatu penelitian yang dilakukan pada keluarga perempuan karier, Bartolome menemukan bahwa, pada rumah tangga dimana suami istri sama-bekerja atau berkarier, justru si istri mempunyai beban ganda dan tetap merupakan pihak yang paling menghabiskan waktu untuk melakukan kerja reproduksi yang tidak bernilai pasar. Keadaan tidak seimbangan ini disebabkan oleh nilai-nilai patriarkhi

yang diadopsi tidak hanya dalam kehidupan rumah tangga akan tetapi juga oleh semua masyarakat bahkan negara.

e. Kekerasan

Kekerasan (*violence*), timbul sebagai akibat faktor-faktor di atas dan juga adanya anggapan bahwa laki-laki adalah pemegang supremasi dan dominasi terhadap berbagai sektor kehidupan sehingga yang terjadi adalah relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Meminjam bahasa Catrinne Mac Kinnon disebut dengan "Phallogocentris", dunia masih berada di genggamannya laki-laki. Ironisnya, fenomena ini oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang wajar jika perempuan yang menerima perlakuan tersebut. Perbedaan peran gender dengan segenap manifestasinya sebagaimana disebutkan di atas, menurut hemat penulis mengakibatkan tersosialisasinya citra, posisi, kodrat, dan penerimaan nasib perempuan. Dengan kata lain, segenap manifestasi ketidakadilan gender merupakan proses penjajakan (*cooptation*) yang dilakukan oleh ideologi patriarki yang secara tidak sadar telah menjejalkan dalam kehidupan kaum perempuan sendiri, sehingga perempuan sendiri

juga menganggap bahwa kondisi dan posisi yang ada seperti sekarang ini sebagai sesuatu yang normal dan kodrati.

B. Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga: Pandangan Teori Sosial Dan Feminis

Relasi gender dalam konteks ini adalah konsep hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan berdasar kualitas, *skill*, peran dan fungsi dalam konvensi sosial yang bersifat dinamis mengikuti kondisi sosial yang selalu berkembang (Umar, 2000 : xx). Sedangkan institusi keluarga adalah sebuah institusi sosial dasar yang disatukan oleh perkawinan dan yang mempunyai komponen-komponen dengan peran sosial dan fungsi masing-masing. Peran-peran sosial itu saling berhubungan secara timbal balik dan saling tergantung membentuk satu kesatuan rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi antar komponen sesuai dengan peran dan fungsinya sangat diperlukan agar sistem tersebut bisa berjalan.

1. Pandangan Teori Sosial

a. Teori Struktural-Fungsional

Perhatian teori struktural fungsional terhadap relasi gender dalam institusi keluarga oleh Parsons adalah sebagai reaksi dari pemikiran-

pemikiran tentang lunturnya fungsi keluarga karena adanya modernisasi. Menurut Parsons, keluarga adalah ibarat hewan berdarah panas yang dapat memelihara temperatur tubuhnya agar tetap konstan walaupun kondisi lingkungan berubah. Hal ini bukan berarti keluarga selalu bersifat statis dan tidak bisa berubah, akan tetapi selalu beradaptasi mulus dengan lingkungan atau dalam bahasa Parson disebut dengan *dynamic equilibrium*. Menurut teori ini dalam konteks relasi gender, pembagian peran secara seksual adalah wajar. Suami mengambil peran instrumental, membantu memelihara sendi-sendi masyarakat dan keutuhan fisik keluarga dengan jalan menyediakan bahan makanan, tempat perlindungan dan menjadi penghubung keluarga dengan dunia luar, *the world outside the home*. Sementara isteri mengambil peran ekspresif membantu mengentalkan hubungan, memberikan dukungan emosional dan pembinaan kualitas yang menopang keutuhan keluarga serta menjamin kelancaran urusan rumah tangga. Menurut teori ini, jika terjadi tumpang tindih dan penyimpangan fungsi antara satu dan lainnya, maka sistem keutuhan

keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. Dengan kata lain kerancuan peran gender akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumahtangga, atau bahkan perceraian.

Keseimbangan akan menciptakan sebuah sistem sosial yang tertib (*social order*). Ketertiban akan tercipta kalau ada struktur atau strata dalam keluarga, dimana masing-masing individu mengetahui posisinya dan patuh pada sistem nilai yang melandasi struktur tersebut. Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut maka tiga elemen utama dalam struktur internal keluarga harus saling terkait, antara lain: status sosial, peran sosial dan norma sosial (Bales, 1976 : 66).

Berdasarkan status sosial, keluarga dibagi dalam tiga struktur utama yaitu bapak/suami, ibu/istri dan anak-anak. Dalam struktur ini, masing-masing mempunyai status sosial yang memberikan identitas pada masing-masing individu. Misalnya, suami/bapak adalah kepala rumahtangga, isteri adalah ibu rumahtangga dan lain-lain. Sedangkan peran sosial adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat memotivasi tingkah

laku seseorang yang menduduki status sosial tertentu. Setiap status sosial tertentu mempunyai fungsi dan peran yang diharapkan terkait interaksinya dengan individu lain dalam keluarga. Misalnya, seorang yang berstatus sebagai kepala rumah tangga, diharapkan mempunyai peran instrumental, yaitu menjamin kelangsungan hidup dan melindungi keluarganya. Sedangkan status ibu rumah tangga, mempunyai peran emosional atau ekspresif yang bisa memberikan kelembutan, kasih sayang dan cinta dan tentunya berperan dalam lingkup domestik. Peran sosial ini sangat dipengaruhi oleh norma-norma budaya dimana mereka berada.

Norma sosial dalam institusi keluarga menurut pandangan aliran ini menjadi sesuatu yang penting, karena sebagai standar tingkahlaku dalam kehidupan berkeluarga. Norma sosial ini sebagai aturan main dalam pembagian tugas sesuai dengan struktur keluarga sehingga semua bisa berjalan secara teratur. Menurut Levy, dengan pembagian tugas ini dimaksudkan agar fungsi keluarga tidak terganggu sehingga relasi antara suami-isteri bisa berjalan secara seimbang. Konflik dalam keluarga

akan terjadi apabila antar anggota keluarga tidak memenuhi kesepakatan siapa yang akan memerankan tugas apa (Intyre, 1966 : 69).

Harmoni dan stabilitas dalam keluarga, menurut teori fungsional struktural sangat ditentukan oleh efektifitas konsensus nilai-nilai. Sistem ini senantiasa bekerja dan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan (*equilibrium*). Meskipun konflik sewaktu-waktu bisa muncul tetap dalam batas yang wajar dan bukan merupakan ancaman yang bakal merusak sistem sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Talcott Parsons dan Robert Bales, bahwa relasi gender dalam institusi keluarga lebih merupakan pelestarian keharmonisan ketimbang bentuk persaingan. Pola relasi gender dalam konteks teori ini ditentukan oleh faktor (Narwoko, 2004 :52) **Pertama**, kekuasaan dan status. Laki-laki memiliki kekuasaan dan status lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Perempuan dinilai mempunyai perilaku lembut dan laki laki berpenampilan dan berperilaku tegas dan jantan sehingga memiliki status dan kekuasaan lebih besar. **Kedua**, komunikasi non verbal. Komunikasi antara laki-laki dan perempuan dalam

masyarakat berlangsung dalam suasana yang disebut Nancy Henlley sebagai kemampuan kurang (*less powerful*) bagi perempuan dan kemampuan lebih (*more powerful*) bagi laki-laki. Dalam suasana selalu dikontrol, perempuan dengan subordinasinya menampilkan diri dengan serba hati-hati, sedangkan laki-laki dengan otoritas yang dimiliki menampilkan diri lebih terbuka dan komunikatif. Sehingga dalam relasi gender laki-laki memiliki *skor* lebih unggul dalam penentuan norma-norma masyarakat (Narwako, 2004 :52), dan **Ketiga**, pembagian kerja. Relasi kuasa dan status yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar pembagian kerja dalam rumah tangga. Dalam masyarakat tradisional maupun modern, kondisi ini tetap terjadi walaupun dalam konteks yang berbeda. Urusan-urusan produktif seakan- akan menjadi tugas laki-laki dan reproduktif menjadi tugas perempuan. Laki-laki dikonsepsikan mengurus urusan publik dan perempuan urusan domestik.

Menurut hemat penulis teori ini lebih menekankan pada pola relasi gender vertikal patriarkhi, sehingga apabila ada pergeseran pola relasi

maka yang akan terjadi adalah disharmoni bahkan perceraian. Hal tersebut senada dengan pendapat Lindsey (Narwako, 2004 : 346), bahwa teori ini secara ideologis telah digunakan untuk memberikan pengakuan terhadap pelanggaran dominasi laki-laki dan stratifikasi gender dalam keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya.

b. Pandangan Teori Konflik

Pendekatan sosial konflik dalam institusi keluarga, dikembangkan oleh Friedrich Engels, yang mencoba menganalisis pola konflik dalam keluarga. Menurut Engels, keluarga *nukleus* dilihat dari pemilikan pribadi adalah penindasan paling parah terhadap perempuan. Pola relasi suami-isteri oleh Engels dianalogikan sebagai relasi antara kelas kapitalis dan proletar, hamba-tuan, pemeas dan yang diperas, dan ini telah terkonstruksi dalam kehidupan masyarakat *dus* rumah tangga. Pola relasi tersebut oleh Marx dan Engels disebut dengan pola relasi *materialist determinism* (Randall, 1987 : 13).

Tokoh lain adalah Collins dan Dahrendorf, yang mencoba menerapkan teori Marx dan Engels

secara lebih sistematis mengenai pola relasi antara suami-isteri. Dengan mengkritik model keluarga struktural-fungsional, Collins mengemukakan bahwa keluarga struktural-fungsional dijadikan institusi untuk melanggengkan sistem patriarkhi, dimana kedudukan suami-isteri dan anak-anak tetap dalam posisi vertikal sebagai struktur yang ideal. Padahal struktur vertikal justru berpotensi untuk timbulnya konflik yang berkepanjangan. Keluarga ideal menurut Collin adalah yang berlandaskan pada *companionship*, dimana relasi suami-isteri bersifat horisontal (tidak hierarkhis). Sedangkan Dahrendorf, menegaskan bahwa peran yang dilembagakan oleh institusi keluarga akan menciptakan pola relasi yang opresif, karena kedudukan perempuan dianggap sebagai "budak kecil tercinta" (Randall, 1987 : 13).

Menurut teori ini, situasi konflik dalam institusi keluarga tidak dianggap sebagai sesuatu yang abnormal atau disfungsional, akan tetapi sebagai sesuatu yang alami dalam proses sosial. Seorang suami yang mempunyai kedudukan sebagai kepala keluarga akan menimbulkan konflik terbuka dengan istrinya yang

berkedudukan sebagai ibu rumahtangga. Hal tersebut adalah wajar dan alamiah, karena menurut pandangan teori ini siapa yang mempunyai kekuasaan akan menindas pada siapa yang ada di bawahnya.

Hubungan yang penuh konflik dalam institusi keluarga terjadi karena setiap individu cenderung memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) dan konflik pasti mewarnai keluarga, karena kesatuan individu dalam keluarga bukan dibentuk melalui asas harmoni melainkan dengan pemaksaan. Jika kesadaran isteri (perempuan), yang dalam teori ini digambarkan sebagai kaum proletar, meningkat dan konflik tidak dapat dikendalikan maka yang terjadi adalah perubahan. Dalam konteks keluarga, perubahan bisa kearah positif maupun negatif.

Menurut hemat penulis, pola relasi horisontal dalam teori ini apabila diterapkan pada keluarga yang sudah egaliter justru akan mendorong adanya perubahan yang positif dalam keluarga tersebut. Akan tetapi bagi keluarga yang belum egaliter justru akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut.

2. Pandangan Teori Feminis

Kelompok feminis berpendapat bahwa keluarga adalah sumber eksploitasi khususnya bagi kaum perempuan. Pembagian kerja dan peran dalam keluarga menurut pandangan kelompok ini terjadi secara tidak adil dan tidak proposional, sehingga relasi gender menjadi timpang. Pembagian kerja tersebut umumnya dilandasi oleh ideologi patriarki. Melalui proses yang panjang dan *bias* “kepentingan” laki-laki, maka pembagian kerja dan peran di dalam keluarga, cenderung mempunyai beban yang tidak seimbang. Perempuan biasanya ditempatkan pada posisi yang harus menjalankan peran dan tanggungjawab yang berkaitan dengan pekerjaan domestik dan laki-laki pada sektor publik. Pembagian kerja seperti ini sepihak kelihatan ringan, akan tetapi dalam prakteknya menyebabkan kaum perempuan harus bekerja dengan jam yang lebih panjang dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Lebih lanjut yang terjadi bukan pembagian kerja dan peran antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkembang dan terus menerus dikonstruksi secara sosial budaya

adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Implikasi yang paling menonjol dan memojokan kaum perempuan akibat perbedaan tersebut adalah terputusnya akses kelompok perempuan terhadap sumber daya utama (ekonomi, budaya dan politik) serta berpengaruh terhadap penilaian tempat dimana kaum perempuan “pantas” bekerja dan seberapa “pantas” kerja tersebut dihargai..

Menurut teori ini, tujuan perkawinan akan tercapai jika dalam keluarga dibangun atas dasar relasi gender yang setara dan adil, dimana laki-laki perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peran dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati, menghargai dan bantu membantu diberbagai sektor kehidupan.

Ada beberapa aliran dalam teori ini, akan tetapi dalam penelitian ini hanya akan memakai dua aliran feminis, yaitu: feminis liberal dan sosialis. Alasan penulis hanya mengemukakan dua aliran tersebut karena kedua aliran tersebut masih mendukung adanya institusi keluarga.

a. Feminis Liberal

Dalam pemikiran aliran ini laki-laki dan perempuan diciptakan secara seimbang dan serasi. Oleh karena itu seharusnya tidak terjadi penindasan antara satu dan lainnya. Pemikiran ini terinspirasi oleh prinsip-prinsip pencerahan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kekhususan-kehususan. Secara ontologis keduanya sama, hak laki-laki dengan sendirinya juga menjadi hak perempuan. Aliran ini membenarkan perempuan bekerjasama dengan laki-laki, mereka menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total di dalam semua peran termasuk peran publik. Caranya adalah dengan melibatkan perempuan dalam berbagai peran seperti peran sosial, ekonomi dan politik. Organ reproduksi bukan penghalang terhadap peran-peran tersebut, sehingga tidak ada kelompok dominasi jenis kelamin. Aliran ini menghendaki pola relasi gender 50/50.

Keluarga yang ideal dibangun atas dasar berkesetaraan dan berkeadilan gender serta kesejahteraan. Jadi feminisme ini mencoba menempatkan perempuan

dan laki-laki sejajar, mandiri, bekerja sama dan bebas untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Ditegaskan kembali perempuan berharap mendapatkan kesempatan dalam bidang-bidang kehidupan untuk dapat setara dengan laki-laki. Peran perempuan dalam keluarga selama ini hanya pada sektor domestik. Mereka berharap dapat mengakses pekerjaan pada ranah publik. Feminisme liberal berharap agar dapat mengusik dominasi budaya patriarki. Logikanya jika dominasinya goyah maka terdapat kesempatan agar dapat menyetarakan diri. Misalnya pendidikan bagi perempuan dijadikan modal agar kelak ketika berkeluarga, perempuan memiliki opsi bekerja di ranah publik. Jadi secara garis besar konsep keluarga dari feminisme liberal adalah keluarga yang diharapkan tanpa adanya pihak inferior. Baik suami maupun istri memiliki peran yang seimbang di sektor publik dan domestik. Perempuan yang mampu untuk bekerja juga harus mendapat kesempatan.

b. Feminis Sosialis

Aliran ini diwarnai oleh pemikiran-pemikiran Karl Max. Oleh karena itu, dalam pandangan aliran ini, pola relasi gender dalam realitas masyarakat lebih disebabkan oleh faktor budaya. Posisi inferior perempuan dalam institusi keluarga berkaitan dengan struktur keluarga dalam masyarakat kapitalis dan pola relasi yang timpang yang disebabkan oleh penerapan sistem kapitalis yang mendukung tenaga kerja tanpa upah bagi perempuan dalam lingkup rumah tangga. Akhirnya yang terjadi, isteri secara ekonomi tergantung pada suami dan memecahkan keamanan ekonomi rumahtangganya karena dukungan kekuasaan kepada suami. Oleh karena itu agar pola relasi laki-laki dan perempuan seimbang diperlukan peninjauan struktur secara mendalam, terutama menghapuskan dikotomi pekerjaan sektor domestik dan publik.

c. Feminisme Radikal

Golongan ini menginginkan penggantian budaya patriarki yang telah mendarah daging dalam tubuh institusi keluarga dengan matrilenial. Aliran ini juga

berpendapat bahwa laki-laki menindas perempuan dan perempuan tidak bersalah. Perempuan mempunyai nilai positif mutlak sebagai perempuan. Perempuan sama dengan laki-laki yang bisa mandiri. Aliran radikal ingin mengganti konsep keluarga konvensional. Konsep yang dinilai menempatkan perempuan pada posisi inferior. Kondisi tersebut terjadi tanpa memandang segala potensi yang ada dalam diri perempuan. Aliran ini secara tidak langsung berpendapat perempuan juga dapat menjadi kepala keluarga. Inti konsep keluarga oleh feminisme radikal pemimpin keluarga tidak selalu laki-laki. Istri juga dapat menjadi kepala keluarga. Perempuan jelas punya potensi dan kesempatan untuk bekerja di ranah publik.

d. Feminisme Eksistensial

Jean Paul Satre membenarkan bahwa perempuan dijadikan laki-laki sebagai objek. Terobongnya perempuan merupakan salah satu bukti budaya patriark yang dominan. Sedangkan Simone de Beauvoir mengatakan bahwa dunia perempuan selalu akan dimasukkan

kedalam dunia laki-laki sebagai bukti penguasaan laki-laki terhadap perempuan. Dan Beauvoir memberi contoh pada lembaga pernikahan yang sebenarnya merebut kebebasan perempuan. Beauvoir juga mengkritik psikoanalisis yang mengatakan bahwa perempuan adalah makhluk yang tidak lengkap dan dijadikan objek laki-laki dari segi biologis serta menganggap perempuan memiliki keterbatasan biologis untuk dapat bereksistensi sendiri. Jadi konsep keluarga dalam golongan ini jelas ditolak. Bahkan golongan ini juga menolak melegalkan perkawinan. Karena perkawinan hanya menyebabkan kebebasan perempuan hilang. Laki-laki terlalu menjadikan perempuan sebagai objek. Golongan ini secara jelas berpendapat laki-laki dan perempuan dapat hidup berdampingan tanpa disatukan oleh institusi pernikahan.

e. Feminisme Postmodern

Perempuan berusaha untuk keluar dari peraturan-peraturan dalam kehidupannya yang telah mengekang keberlangsungan hidup mereka dan ingin menjadi apa yang wanita inginkan. Perempuan

dibatasi oleh nilai-nilai dan norma perilaku dalam masyarakat hal tersebut menyebabkan perempuan tidak bebas. Misalnya, perempuan tidak boleh bersikap maskulin dan sebagainya. Golongan ini berusaha membongkar konstruksi-konstruksi yang ada dalam tubuh masyarakat. Konstruksi sosial dan budaya telah langgeng pada diri masyarakat menyebabkan perempuan tidak bebas. Apalagi dalam konstruksi oleh keluarga. Pasti terdapat opini-opini yang lebih tegas dan tidak menguntungkan perempuan. Kebebasan perempuan menghilang seiring dengan konstruksi-konstruksi tersebut. Feminisme postmodern sudah tidak “bermusuh tunggal” patriarki saja. Meski begitu, feminisme ini mendukung teori dari feminisme eksistensialis. Tapi penganut aliran feminisme lainnya tidak setuju dengan pendapat feminisme postmodern.

PENUTUP

Masing-masing teori (struktural fungsional, konflik dan feminis) memiliki sudut pandang sendiri-sendiri mengenai pola relasi gender dalam keluarga. Akan tetapi secara serempak mengakui bahwa konstruksi sosial budaya tetap berpengaruh

secara signifikan atas pembagian peran yang dimainkan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam institusi keluarga. Artinya konstruksi sosial budaya sangat berperan dalam memberikan kontribusi penciptaan relasi antara laki-laki dan perempuan secara adil atau sebaliknya terjadi ketimpangan. Faktor penyebab ketidakseimbangan relasi gender dalam institusi rumah tangga, antara lain: siapa penyumbang terbesar penghasilan rumah tangga; adanya pengaruh nilai patriarkhi; perhatian perempuan dalam pengasuhan anak dan; siapa pemilik posisi menguntungkan dan lebih berpeluang memaksakan negosiasi pembagian kerja rumah tangga yang jauh dari setara dan meninggalkan perkawinan apabila negosiasi gagal. Kultur patriarkhi menempati urutan sebagai variabel ke dua dalam memproduksi ketimpangan relasi gender, akan tetapi secara sadar maupun tidak, kultur patriarkhi telah memperteguh konstruksi perbedaan peran gender yang cenderung menguntungkan kaum laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Birley, Sue, dan Daniel F. Muike, 2004, *Financial Time Mastering – Entrepreneurship*, London: Pearson Education Limited.
- Demartoto, Argyo, 2007, *Menyibak Sensitivitas Gender Dalam Keluarga Difable*, Surakarta : UNS Press.
- Echols, John M., dan Hasan Shadily, 1993, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Fakih, Mansour, 1999, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti, 2002, *Konsep dan teknik Penelitian Gender*, Malang: UMM Press.
- Horton, Paul B. & Chester L. Hunt, 1999, *Sosiologi*, 6th Edition (tjm), Jakarta: Erlangga.
- Intyre, J. Mc., 1966, *The Structure – Fungsional Approach to Family Study*, New York: The Mcmillan Co.
- Jacobsen, Joyce P., 1994, *The Economics of Gender*, Massachusetts: Blackwell Publisher, 1994,
- Levy, Marion JJ, 1971, *The Revolution in Modern China*, New York: Octagon Books.
- Lindsey, Linda L., 1990, *Gender Role: a Sociological Perspective*, New Jersey: Prentice Hall.
- Megawangi, Ratna, 1999, *Membiarkan Berbeda : Sudut Pandang Relasi Gender*, Bandung: Pustaka Mizan.

- Mills, CW., 1959, *The Sociological Imagination*, New York : Oxford University Press.
- Narwoko, J. Dwi, dan Bagong Suyanto, 2007, *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Prenada Media.
- Nye, F.Ivan, *Role Structure and Analysis of The Family*, California & London: Sage Library of Social research, 1076
- Pambudy, Mardiana EM, 2003, “*Karier dan Otonomi Perempuan*”, Tesis Program kajian Wanita Fak. Pasca Srijana UI,
- Parsons, T., dan R.F Bales, 1976, *Family: socialization and Interaction Process*, London: Routledge, Kegan & Paul.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa, ” *Gender dan Pemaknaannya: Sebuah Ulasan Singkat*” , *Makalah Workshop Sensitivitas Gender dalam Kajian Manajemen*, Yogyakarta: PSW IAIN SUKA, 18 September 2002
- Randall, Collins, 1987, *Sosiologi of Marriage and the family: Gender, Love and Property*, Chicago: Nelson Hall.
- Sanderson, Stephen K., 2003, *Sosiologi Makro, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial* (tjm) Farid Wajidi dan S.Meno, Jakarta: Rajawali Press.
- Suyanto, 2004, J. Dwi Narwoko-Bagong, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Suzanne J. Kessler dan Wendy McKenna, *Gender : An Ethnometodological Approach.*, New York: John willey & Sons, 1977.
- Sztompka, Piotr, 2005, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta; Prenada Media.
- Umar, Nazarudin, 1999, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*, Jakarta: Paramadina.